

## SUMMARY

# PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARASITA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Created by HELGA NOOR ANGELA FARIED

**Subject** : KEBIJAKAN LARASITA, ADMINISTRASI

**Subject Alt** : LARASITA POLICY, ADMINISTRATION

**Keyword** : KEPEMILIKIAN TANAH

### **Description :**

kepemilikan tanah yang sah dapat dijadikan untuk pinjaman modal dengan cara menggagunkan sertifikat tanah pada bank sehingga hal inilah yang menjadi dorongan bagi BPN RI untuk melakukan terobosan inovatif yaitu dengan membuat program pelayanan pertanahan dengan sistem “jemput bola” mendatangi masyarakat secara langsung yang bernama Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) sekaligus mengubah paradigma masyarakat dari yang menunggu menjadi pro aktif yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat karena didapat dari laporan tahunan penyelesaian pekerjaan di kantor tersebut dari tahun ke tahun cenderung semakin menurun. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh implementasi kebijakan Larasita terhadap tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan apa kendala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mengimplementasikan kebijakana Larasita. Metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari hasil evaluasi penyelesaian pekerjaan sebelum ada kegiatan Larasita dan setelah adanya kegiatan Larasita dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari berkas masuk dan realisasi penyelesaian pekerjaan. Adapun kendala yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Sumber daya manusia di kantor tersebut masih sedikit, Pelaksanaan tugas harus menunggu disposisi dari atasan yang berlapis-lapis, Masyarakat masih menganggap pengurusan sertifikat itu berbelit-belit di BPN karena persyaratan masih terdapat kekurangan, sebenarnya untuk kelengkapan persyaratan pembuatan sertifikat tanah berada pada kewenangan dari instansi lain.

**Date Create** : 20/10/2013

**Type** : Text

**Format** : PDF

**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Undergraduate-2009-41-166

**Collection** : 2009-41-166

**Source** : Undergraduate Theses Of Law

**Relation Collection** Universitas Esa Unggul

**COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : Copyright @2013 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor